

Judul : Anggaran meningkat, perbaiki terus mutu pendidikan
Tanggal : Kamis, 21 Agustus 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Anggaran Meningkat Perbaiki Terus Mutu Pendidikan

KETUA Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian meminta Pemerintah mempertimbangkan ulang pengalokasian 44,2 persen anggaran pendidikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Proporsi anggaran yang terlalu besar pada satu program berisiko menimbulkan ketimpangan dalam pembangunan sektor pendidikan secara keseluruhan.

Dia mengatakan, penggunaan anggaran seharusnya diarahkan pada program yang menyentuh inti perbaikan mutu pendidikan. Program itu mencakup gaji dan kesejahteraan guru, peningkatan kompetensi, beasiswa, bantuan operasional, hingga penguatan pendidikan vokasi. "Ini harus jelas dan terukur," tegasnya, kemarin.

Hetifah mengingatkan Pemerintah agar mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pengalokasian anggaran 2026. Putusan MK itu terkait penyelenggaraan pendidikan dasar gratis, baik di sekolah negeri maupun swasta. "Pemerintah juga harus memastikan distribusi bantuan berjalan merata," ujar politikus Partai Golkar itu.

Pendidikan, lanjutnya, bukan hanya soal gizi, tapi juga kualitas proses belajar mengajar dan kesiapan sumber daya manusia pendidik. Karena itu, penyusunan postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang diumumkan Pemerintah

masih perlu dimatangkan.

Dia berharap, pelaksanaan program MBG yang bertujuan meningkatkan gizi siswa bisa tetap beriringan dengan agenda peningkatan mutu pendidikan. "Sehingga anggaran besar yang digelontorkan benar-benar jadi investasi jangka panjang bagi masa depan generasi bangsa," tandasnya.

Senada, anggota Komisi X DPR Furtasan Ali Yusuf menilai, pengalihan hingga 44 persen anggaran pendidikan untuk MBG masih perlu diperdebatkan. Apakah porsi itu benar-benar termasuk kategori dana pendidikan atau tidak.

Meski sasaran program MBG adalah siswa, hal tersebut perlu dikaji lebih lanjut. Komisi X bersama Pemerintah akan segera membahas detail pengalokasian itu dalam rapat lanjutan. "Kalau memang sasarannya jelas kepada anak-anak di sekolah, tentu masih masuk kategori pendidikan. Tapi kalau tidak, ini harus dikaji ulang," tegasnya.

Terkait implementasi anggaran pendidikan 2026, Furtasan menyebut dana tersebut sudah terbagi ke sejumlah program prioritas. Antara lain tunjangan guru dan dosen, revitalisasi pendidikan, serta beasiswa. Untuk Program Indonesia Pintar (PIP), ditargetkan menjangkau 20 juta penerima. Sedangkan untuk program Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebanyak 1,2 juta penerima. ■ PYB